

KONSTRUK MODERASI BERAGAMA BERBASIS PENDIDIKAN INKLUSIF

Oleh:

H. Abd. Rahim Yunus

UIN Alauddin Makassar

Abstract

Religious moderation is a very important need along with the increasingly strong phenomenon of radicalism, one of which comes from problems in the world of education. The polarization of the education system trapped in the exclusivity of understanding religion requires a change in the education paradigm that is inclusive. In this context, inclusive education by constructing the construct of moderate education based on inclusive education is a solution in strengthening religious moderation by strengthening universal values such as humanity, safety, justice, love, and the like.

Keywords: *Religious Moderation, Inclusive Education*

I. Pendahuluan

Dunia pendidikan merupakan wahana pengembangan potensi manusia yang pada dasarnya memiliki relevansi konstruktif dalam membangun sikap yang bijak dalam memahami dirinya sebagai individu dan bagian dari sebuah struktur sosial yang plural. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan merupakan suatu proses yang rigid atas realitas kemajemukan yang imanen dalam diri setiap manusia sehingga tahapan demi tahapan yang ada pada pendidikan seharusnya selalu bersinergi dengan realitas kemajemukan tersebut, baik teoretis ataupun praktisnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kesan kontra-produktif dari sebuah proses pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan output yang bijak memahami realitas kemajemukan yang ada pada manusia dan interaksi sosialnya. Konsekuensinya, pendidikan justru mereduksi potensi manusia dalam memahami jati dirinya serta kepekaan sosial yang dimilikinya.

Menyikapi hal tersebut, Abdul Munir Mulkhan menggambarkan bahwa sentralisasi pendidikan yang terjadi selama ini telah membangun kesadaran atas tidak berharganya keunikan manusia dan anak didik. Hal ini menyebabkan manusia kehilangan jati diri dan kepekaan sosialnya. Keunggulan kemanusiaan

lebih terkonsentrasi pada lingkaran yang menempatkan pendidikan sebagai alat politik dan kebudayaan, bukan praktek politik dan kebudayaan itu sendiri.⁵⁷

Apabila pendidikan saja yang dianggap sebagai ikhtiar pada-andragogis dalam membawa manusia pada potensi imanennya yang hanif sudah terjebak pada pusarannya kepentingan yang pragmatis-hedonis, bisa dibayangkan bagaimana beratnya tantangan untuk mengembangkan potensi manusia yang memiliki kearifan sosial atas realitas kemajemukan yang melingkupinya. Dalam mengatasi hal tersebut, pendidikan inklusif menjadi suatu terobosan dalam melahirkan output pendidikan yang bisa berpikir inklusif terhadap berbagai fenomena sosial yang sarat dengan kemajemukan tersebut. Pendidikan inklusif sebagai antitesa dari pendidikan eksklusif mencoba untuk membuka ruang yang lebih luas dalam konteks pada-andragogis yang mampu mentransformasikan nilai-nilai moderat pada berbagai komponen pendidikan yang terdiri atas tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peran pendidik, peran peserta didik, aktivitas pembelajaran, serta materi pembelajaran. Nilai-nilai moderat dalam kerangka makronya bisa berafiliasi dengan kemajemukan pada berbagai konteksnya seperti kemajemukan kebangsaan, suku, ormas, serta agama. Khusus yang disebutkan terakhir yaitu agama, bisa dikatakan merupakan salah satu faktor yang seringkali berimplikasi pada munculnya sikap fanatik yang pada gilirannya mereduksi sikap moderasi dalam memahami kemajemukan beragama. Ada kesan bahwa agama yang diajarkan selalu berupaya untuk menanamkan sikap fanatisme internal yang rigid dalam memahami realitas kebenaran yang imanen pada agama yang lain. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah perlu suatu upaya terstruktur dalam mengembangkan moderasi beragama berbasis pendidikan inklusif. Upaya ini bukan merupakan suatu proses yang bersifat kebetulan karena pada dasarnya terdapat suatu persinggungan ontologi, epistemologi serta aksiologi antara moderasi beragama dan pendidikan inklusif.

II. Pembahasan

A. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu terobosan pada-andragogis yang mendudukkan pendidikan pada kerangka yuridis-normatifnya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 yang menegaskan “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”⁵⁸ serta PERMENDIKNAS Nomor 70

⁵⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Dunia Pendidikan sebagai Perang Kekerasan dalam Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: PPIRM, The Asia Foundation bekerjasama dengan Pustaka Belajar, 2000), h. 35.

⁵⁸ Republik Indonesia, “UUD 1945”, jdih.pom.go.id/uud1945.pdf. (23 Juni 2019)

Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 yang menegaskan “Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”⁵⁹ Implikasinya, pendidikan inklusif melihat bagaimana pendidikan harus mampu mengakomodir setiap warga negara yang berhak atas pendidikan dengan melihat berbagai potensi yang imanen pada setiap peserta didik sehingga mereka semua mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan yang lainnya.

Filosofi dari semboyan “*One School for All*” mengisyaratkan perlunya suatu ruang pendidikan terbuka kepada siapa saja yang tidak hanya terbuka pada aksesnya tapi juga prosesnya secara holistik. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif memiliki peran strategis dalam mengembangkan pendidikan yang adil merata tanpa ada diskriminasi. Paling tidak inilah semangat awal yang diusung oleh pendidikan inklusif meskipun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna fungsional sebagai sebuah proses pendidikan yang *open minded* terhadap realitas kemajemukan yang melekat pada berbagai komponen pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif berupaya menganalisis suatu obyek pembelajaran secara komprehensif dengan mengintegrasikan pemahaman pada peserta didik terkait perlunya melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif. Pada dasarnya, semangat awal pendidikan inklusif yang hanya terbatas pada membahas persoalan akses pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan tertentu seperti cacat fisik, keterbelakangan mental dan semacamnya memiliki implikasi praktis pada upaya untuk membangun pola pikir yang inklusif bagi peserta didik. Semboyan “*One School for All*” telah mengajarkan pada semua pelaku pendidikan untuk memiliki pola pikir inklusif dalam memahami pendidikan dari setiap tahapannya.

Sikap inklusif dalam melihat berbagai fakta empiris dengan berbagai dimensinya dalam kehidupan sehari-hari menuntut suatu gerak aktif daripada sekedar konsep yang pasif. Menyikapi hal tersebut, Alwi Shihab mengisyaratkan bahwa dalam inklusivisme yang terpenting adalah bukan semata-mata berupa pengertian yang merujuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun juga keterlibatan aktif dalam kemajemukan tersebut. Partisipasi tersebut ditunjukkan melalui sikap interaktif secara positif dalam

⁵⁹Menteri Pendidikan Nasional RI, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009” <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. (23 Juni 2019)

lingkungan yang majemuk, tidak melakukan klaim dan monopoli atas suatu kebenaran, serta bersikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.⁶⁰

Berdasarkan apa yang digambarkan Alwi Shihab di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan inklusif meniscayakan suatu agresifitas dalam mereduksi berbagai potensi munculnya sikap eksklusif dalam beragama. Pendidikan inklusif dalam perkembangannya harus terpola pada struktur moral etis yang dikandung oleh setiap agama yang kemudian dikenal sebagai nilai universal. Nilai universal inilah yang menjembatani dialog teologis-normatif dari setiap agama yang terpola melalui proses pada-andragogis.

B. Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan isu strategis yang dikembangkan oleh negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lokomotifnya. Munculnya isu ini tentu bukan merupakan suatu hal yang bersifat kebetulan melainkan ada sebuah kekhawatiran yang sangat mendalam terkait dengan munculnya radikalisme beragama. Berbagai rentetan kejadian yang membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan beragama yang salah satunya adalah konflik antara umat beragama. Fakta historis telah merekam berbagai konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan agama sebagai alasannya adalah konflik Islam vs Nasrani di Poso, konflik Islam vs Nasrani di Ambon, konflik Islam vs Nasrani di Tolikara, dan yang lainnya. Hal ini digambarkan oleh Siti Aisyah BM bahwa pandangan keagamaan berperan penting dalam memicu berbagai konflik. Ketidakmampuan untuk menerjemahkan pesan wahyu, yang mengakibatkan hilangnya orientasi atau ketidakpastian dan bahkan putus asa. Ini adalah salah satu masalah agama, yaitu masalah makna. Masalah ini menjadi salah satu yang bisa menjadi salah satu alasan bagi keselarasan hidup sulit untuk membuat dalam bentuk sebenarnya.⁶¹ Dalam konteks ini, agama telah menjadi kontra produktif dengan semangat awalnya yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keselamatan, keadilan, cinta kasih, dan semacamnya.

Sebagai antitesa dari moderasi beragama, kajian terkait dengan radikalisme beragama merupakan suatu bagian yang perlu dikaji seperti dalam teori falsifikasi Karl Popper yang meniscayakan pemahaman sesuatu bisa dipahami dari sisi kebalikannya. Dalam konteks ini, Rubaidi menggambarkan bahwa radikalisme beragama dapat dikenal dengan beberapa ciri yaitu:

1. Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan.

⁶⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 41-42

⁶¹ Siti Aisyah BM, "Konflik Sosial dalam Hubungan antar Umat Beragama", <http://journal.uin-alauddin.ac.id>. (23 Juni 2019)

2. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya, yang dalam hal ini adalah di Timur Tengah, secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian.
3. Perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadist, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah.
4. Menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada al-Qur'an dan hadist.
5. Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.⁶²

Sebagai sebuah sikap yang perlu terus dikembangkan, moderasi beragama adapat dipahami sebagai suatu pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang memeluk agama dengan berpedoman pada sikap moderasi beragama adalah mereka yang selalu melihat suatu dinamika yang berseberangan darinya secara proporsional dengan tidak lebih dari yang semestinya. Hal ini disebabkan oleh watak manusia yang tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata.⁶³ Apa yang digambarkan oleh Yusuf al-Qardhawi di atas menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan berarti terjebak pada sikap brutal dalam beragama yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti nilai-nilai tauhid. Seseorang yang memiliki sikap moderasi beragama tetap wajar apabila memiliki fanatisme terkait agama yang diyakininya tapi sikap fanatisme tersebut tidak ditunjukkan dalam bentuk-bentuk perilaku vulgar yang menciderai struktur sosial yang identik dengan kemajemukan agama dan keyakinan di sekitarnya.

Senada dengan hal tersebut, Nurul Faiqah dan Toni Pransiska menggambarkan bagaimana sikap moderasi beragama di kalangan umat Islam dibangun dengan menjadikan al-Qur'an sebagai landasan normatif teologisnya.

⁶² Ahmad Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdhatul Ulama: Masa Depan Modernisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), h. 63

⁶³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Wasaṭiyyah al-Islāmīyah wa al-Tajdīd : Ma'ālim wa-Manārāt*, (Cairo: Dār al-Syurūq, 2007), h. 56

Al-Qur'an sebagai pedoman dan pegangan hidup umat Islam, banyak menceritakan perihal sikap toleransi dan moderasi. Jika kita percaya pada isi serta kandungan al-Qur'an sebagai kitab toleransi semestinya kita memahami dan meresapi pesan-pesan toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita sebagai umat Islam harus secara sadar dan aktif membumikan pesan-pesan toleransi al-Qur'an pada kehidupan nyata. Ajaran cinta kasih merupakan ajaran yang mendasar dalam agama-agama samawi terdahulu. Apa yang disampaikan al-Qur'an, pada hakikatnya hendak menyempurnakan dan melanjutkan ajaran yang mulia tersebut. Karena itu, meletakkan toleransi sebagai nilai utama dalam keberagamaan umat Islam merupakan salah satu upaya menghadirkan sesuatu yang fundamental dalam Islam.⁶⁴ Posisi al-Qur'an sebagai *magnum opus* ajaran Islam memiliki nilai tawar strategis dalam membumikan sikap moderasi beragama bagi umat Islam. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menggambarkan urgensi dari sikap moderasi beragama.

C. Konstruk Moderasi Beragama Berbasis Pendidikan Inklusif

Konstruk moderasi beragama berbasis pendidikan inklusif merupakan suatu ikhtiar dalam menangkal berbagai perilaku yang menjurus pada radikalisme beragama yang mulai mewarnai dunia pendidikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan dalam posisinya sebagai wahana transformasi nilai-nilai pada-andragogis memiliki ruang transformasi yang lebih luas dalam berbagai paham dengan berbagai karakteristiknya. Dalam konteks ini, Babun Suharto menawarkan tiga langkah strategis dalam menguatkan moderasi beragama melalui dunia pendidikan yang dalam hal ini terdiri atas:

1. Pengarusutamaan moderasi beragama diimplementasikan dalam segala turunan kebijakan perguruan tinggi keagamaan dan diwujudkan dengan pengembangan kajian dan tradisi akademik yang kritis, serta menghargai kelompok atau pendapat lain. Dalam konteks ini, penyematan kurikulum yang di dalamnya terdapat subjek-subjek ideologis harus selalu dipicu sebagai basis penguatan. Subjek ideologis dapat dibaca, misalnya seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Subjek-subjek ideologis ini yang secara spesifik menjadi dasar penguatan ideologi kebangsaan tidak ditemukan dalam kurikulum di perguruan tinggi luar Indonesia. Secara spesifik, perguruan tinggi keagamaan dapat menerapkan kebijakan dan pelembagaan nilai-nilai kewarganegaraan dalam budaya pendidikan.
2. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai wadah dan tempat penyemaian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama,

⁶⁴ Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", *Al-Fikra: Jurnal Keislaman* Vol.17 No.1 Tahun 2018, h. 56

dan moderasi beragama. Persoalan ini sangat mendesak saat pendidikan Islam kembali menghadapi tantangan serius yang menjamur dalam konstruk pemahaman sektarian dan juga Islam transnasional. Pembelajaran integratif yang mendorong perkembangan kajian objektif dan empati terhadap agama-agama lain yang diimplementasikan dengan penguatan pendekatan sosiologis-historis. Untuk mendukung tercapainya diseminasi pemahaman inklusif pada lembaga pendidikan tersebut, dapat pula menginternalisasi perspektif kewarganegaraan bagi semua komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan dengan berbagai cara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam upaya tersebut adalah meningkatkan pembinaan peserta didik yang bersifat lintas kelompok dan golongan dengan menggandeng berbagai komunitas masyarakat berpaham kebangsaan. Strategi ini dapat berguna dengan efektif karena perguruan tinggi adalah wajah habitus pencerahan generasi milenial untuk menanamkan pemikiran toleran, kritis, dan inklusif.

3. Mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*). Dari pendekatan inilah, dialog antaragama akan dimulai dan pada akhirnya dapat mendorong terciptanya pemahaman komprehensif yang berujung pada toleransi kehidupan beragama.⁶⁵

Apa yang ditawarkan oleh Babun Suharto tersebut merupakan suatu kerangka ilmiah praktis dari konstruk moderasi beragama berbasis pendidikan inklusif. Dalam internal agama, sikap eksklusif keberagamaan yang mereduksi sikap moderat juga banyak ditemukan terkait dengan pemahaman atas apa yang tertulis dalam teks-teks normatif agama seperti al-Qur'an dan al-hadis. Abd. Moqsith Ghazali, yang merupakan salah seorang tokoh pemikir muda NU yang sangat progresif dalam pemikirannya mencoba mengomentari realitas kosmopolitan keberagamaan yang sangat plural dalam sebuah tulisannya yang berjudul "*Membangun Teologis Pluralis*", dengan menyatakan bahwa saat ini, semakin sulit mencari suatu negara yang seluruh masyarakatnya menganut agama yang seragam (*uniform*). Bahkan walaupun ada satu masyarakat yang hanya menganut satu agama, pluralitas bisa terjadi pada level penafsiran atas ajaran agama itu. Pluralitas pada wilayah tafsir ini pada gilirannya akan melahirkan pluralitas pada level aktualitas dan pelembagaannya.⁶⁶

⁶⁵ Babun Suharto, "Moderasi Beragama dan Strategi Keilmuan PTKI", <https://radarjember.jawapos.com>. (24 Juni 2019)

⁶⁶ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: Katakita, 2009), h. 3

Ketika pendidikan ingin mengembangkan sikap yang inklusif dalam beragama, lembaga pendidikan harus berbenah seperti yang digambarkan oleh Mardan Umar dalam artikelnya yang berjudul “*Optimalisasi Kedamaian Hidup Beragama melalui Optimalisasi Pendidikan Agama*” bahwa pendidikan agama, dalam prosesnya, harus mengandung nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama dapat disampaikan melalui pemahaman akan enam dunia makna yaitu; a) makna simbolik yang meliputi bahasa, simbol, isyarat-isyarat, dan sebagainya; b) makna empirik sebagai pengembangan kemampuan teoritis, fakta-fakta dan kenyataan tentang kehidupan beragama; c) makna estetik yang meliputi nilai-nilai keindahan dalam agama; d) makna sinoetik yang berkenaan dengan perasaan, kesan, penghayatan dan kesadaran yang mendalam akan nilai-nilai agama; e) makna etik berkenaan dengan aspek-aspek moral, akhlak, perilaku yang luhur, dan tanggung jawab; dan f) makna sinoptik yang berkaitan dengan makna yang mendalam mengenai hal-hal yang bernuansa spiritual.⁶⁷ Apa yang digambarkan oleh Mardan Umar tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bisa dikembangkan sebagai wahana penguatan moderasi beragama dengan memberikan penguatan-penguatan teologis normatif berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadits serta sisi historis ajaran Islam yang pernah dilalui oleh Rasulullah saw yang sarat dengan makna baik simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, ataupun sinoptik.

Konstruk moderasi beragama berbasis pendidikan inklusif harus dilakukan dengan melakukan integrasi nilai moderasi dalam materi dan aktivitas pembelajaran yang menguatkan sisi inklusivitas pada satu sisi serta mereduksi eksklusivitas pada sisi yang lainnya. Dalam upaya tersebut, seorang pendidikan harus mengelaborasi materi pendidikan yang mengacu pada nilai-nilai normatif agama yang sangat akomodatif bahkan rekomendatif terhadap moderasi beragama tersebut. Beberapa ayat yang berkaitan dengan nilai moderasi beragama tersebut dapat ditemukan pada ayat-ayat berikut:

1. QS. al-Maidah/5:18

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

⁶⁷ Mardan Umar, “Optimalisasi Kedamaian Hidup Beragama melalui Optimalisasi Pendidikan Agama”, <https://media.neliti.com/media/publications/273930-pembinaan-kedamaian-hidup-beragama-melal-249b1be1.pdf>. (13 Juni 2019)

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.⁶⁸

2. QS. al-Baqarah/2:94

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka ingnilah kematian(mu), jika kamu memang benar."⁶⁹

Penguatan nilai-nilai normatif teologis dalam konstruk moderasi beragama berbasis pendidikan inklusif menjadi penting untuk dilakukan mengingat ada kesan selama ini bahwa nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keselamatan, keadilan, cinta kasih, dan semacamnya yang pada dasarnya imanen pada setiap agama justru dibonsai atas nama suatu kepentingan dunia yang pragmatis dan profan disinilah sebenarnya salah satu peran agama sebagai suatu sentra transformasi sosial berorientasi moral etis seperti yang digambarkan oleh Robert N. Bellah bahwa agama merupakan suatu sistem sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang berporos pada kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Agama juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci yang dapat mempersatukan orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat.⁷⁰

⁶⁸ QS. al-Maidah/5:18

⁶⁹ QS. al-Baqarah/2:94

⁷⁰ Robert N. Bellah, *Beyond Belief Essei-Essei tentang Agama di Dunia Modern*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 11

III. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting seiring dengan semakin menguatnya fenomena radikalisme yang salah satunya bersumber dari adanya masalah dalam dunia pendidikan. Polarisasi sistem pendidikan yang terjebak eksklusivitas pemahaman terhadap agama menuntut adanya perubahan paradigma pendidikan yang inklusif. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif dengan melakukan konstruk moderasi beragama berbasis pendidikan inklusif menjadi suatu solusi dalam mengokohkan moderasi beragama dengan penguatan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keselamatan, keadilan, cinta kasih, dan semacamnya.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim

- Aisyah BM, Siti, "Konflik Sosial dalam Hubungan antar Umat Beragama", <http://journal.uin-alauddin.ac.id>. (23 Juni 2019)
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief Essei-Essei tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Faiqah, Nurul dan Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai", *Al-Fikra: Jurnal Keislaman* Vol.17 No.1 Tahun 2018.
- Ghazali, Abd. Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Jakarta: Katakita, 2009.
- Menteri Pendidikan Nasional RI, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009" <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. (23 Juni 2019)
- Mulkhan, Abdul Munir, *Dunia Pendidikan sebagai Perang Kekerasan dalam Melawan Kekerasan tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: PPIRM, The Asia Foundation bekerjasama dengan Pustaka Belajar, 2000.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Wasaṭiyyah al-Islāmīyah wa al-Tajdīd : Ma'ālim wa-Manārāt*, Cairo: Dār al-Syurūq, 2007.
- Republik Indonesia, "UUD 1945", jdih.pom.go.id/uud1945.pdf. (23 Juni 2019)
- Rubaidi, Ahmad, *Radikalisme Islam, Nahdhatul Ulama: Masa Depan Modernisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1999.
- Suharto, Babun, "Moderasi Beragama dan Strategi Keilmuan PTKI", <https://radarjember.jawapos.com>. (24 Juni 2019)
- Umar, Mardan, "Optimalisasi Kedamaian Hidup Beragama melalui Optimalisasi Pendidikan Agama", <https://media.neliti.com/media/publications/273930-pembinaan-kedamaian-hidup-beragama-melal-249b1be1.pdf>. (13 Juni 2019)